

## DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Binakefarmasian dan Alat Kesehatan. Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Direktorat Jenderal Binakefarmasian dan Alat Kesehatan; 2010. 1–80 p.
2. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2002. 22 p.
3. Kementerian Kesehatan RI. Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Logistik di Instalasi Farmasi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 1–120 p.
4. Irmawati. Manajemen Logistik di Rumah Sakit. Surabaya: Institut Ilmu Kesehatan - University Press; 2014.
5. Suhadi. Perencanaan Obat Rumah Sakit dan Puskesmas. Jakarta: Sagung Seto; 2018. 71 p.
6. Nugroho A. Cost Effectiveness Analysis Pengadaan Obat Antibiotik Kelompok A dengan Cara RSUD Dokter Soedarso Pontianak dan Metode EOQ di RSUD Dokter Soedarso Pontianak. 2012;
7. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-catalogue). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014. 2 p.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Purchasing Produk Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaga

- Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 1390. 99–117 p.
9. Kementerian Kesehatan RI. RAK Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020. 1–58 p.
  10. Wijaya Andi Saputra, Diah Ayu Puspendari MFK. Evaluasi Pengadaan Obat dengan E-Purchasing Melalui E-Catalogue di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2018. 2019;08(03):113–20.
  11. Kusmini K, Satibi S, Suryawati S. Evaluasi Pelaksanaan E-Purchasing Obat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015. J Manag Pharm Pract. 2016;6(4):277.
  12. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 1–49 p.
  13. Dinas Kesehatan Kota Padang. Laporan Tahunan Tahun 2019 edisi 2020 1. Dinas Kesehatan Kota Padang. Padang: Dinas Kesehatan Kota Padang; 2020.
  14. Villela LMA. Manajemen Logistik. J Chem Inf Model. 2013;53(9):1689–99.
  15. Dr. Faiq Bahfen S. Aspek Legal Layanan Farmasi Komunitas Konsep Pharmaceutical Care. Majalah Medisina. 1(1): 20. Jakarta: Bineka Cipta; 2006.
  16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1988 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 1988. 6–8 p.
  17. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 16 tahun 2018. Jakarta: Peraturan Presiden RI; 2018. 1–5 p.

18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepmenkes Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.
19. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Peraturan Presiden RI; 2021.
20. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Panduan User Distributor e-Purchasing. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 2018.
21. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Jakarta: Peraturan Presiden RI; 2012.
22. Samsul Ramli MIA. Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta: Visemedia Pustaka; 2014.
23. Departemen Kesehatan RI. Evaluasi Program Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 1990.
24. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara; 1996.
25. Supriyanto. Evaluasi Bidang Kesehatan. Surabaya: Brata Jaya; 1988.
26. Riyanti E. Evaluasi Pelaksanaan Program P2DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Tahun 2007. 2008;
27. Saifuddin A. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2010.
28. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni. Jakarta: Rineka Cipta; 2011.
29. Aida Hermiana, Robiyanto dan N. Evaluasi Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) di Kabupaten Sintang Tahun 2015. 2015;4(2):57–63.

30. Sutriatmoko, Satibi dan DAP. Analisis Penerapan e-Procurement Obat dengan Prosedur e-Purchasing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. 2015;275–82.
31. Suherman Awal, Tarsyad Nugraha dan DS. Analisis Kebijakan Pengadaan Obat Secara E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simeulue. 2020;3(1).
32. Sugiyono PD. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2013.
33. Dinas Kesehatan Kota Padang. Rencana Kerja Anggaran DAK Fisik Tahun 2020 (Penyediaan Obat dan BMHP). Padang: Dinas Kesehatan Kota Padang; 2020.
34. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2014.
35. Annisa Susanto N, Mansur M, Djauhari T. Analisis Kebutuhan Tenaga di Instalasi Farmasi RS Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2016. J Medicoeticolegal dan Manaj Rumah Sakit. 2017;6(2):82–9.
36. Patria Widyaishwara Madya N, SDM Provinsi Sumatera Barat B. Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2021;5(1):2021.
37. Sasongko P. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat; 2015.
38. Anggriani Y, Rosdiana R KS. Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Cianjur. Pharm J Farm Indones. 2020;17(2):425–38.
39. Hutasuhut IM, Laniari M. Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Membangunan Nagori di Kecamatan

- Bandar Huluan Kabupaten Simalungun. *Publikauma J Adm Publik Univ Medan Area*. 2016;4(2):131–42.
40. Sa'adah E, Andadari N, Kurniawati J. Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Perbekalan Farmasi di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri. *J Kedokt Brawijaya*. 2014;28(1):15–20.
41. Ningsih A, Fudholi A, Sumarni. Relationship of Application Catalogue Electronic Toward Efficiency. *J Manaj dan Pelayanan Farm*. 2015;(40):233–40.
42. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Dan Pengendalian Persediaan Obat Di Rumah Sakit. Vol. 53, *Journal of Chemical Information and Modeling*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2019. 1689–1699 p.
43. Fairuz NA, Yustiawan T. Perhitungan Konsumsi Obat Untuk Logistik Medik di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. *J Adm Kesehat Indones*. 2018;5(2):155.
44. Mukhlis T. Manajemen Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016. *Univ Sumatera Utara*. 2016;
45. Sulistyowati WD, Restyana A, Yuniar AW. Evaluasi Pengelolaan Obat Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Jombang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *J Inov Farm Indones*. 2020;1(2):60.
46. Priyambodo B. Penentuan Harga Obat. *J Gajah Mada Univ*. 2012;
47. Ni Luh Suryantini, Gayatri Citraningtyas SS. Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat Antibiotik dengan Menggunakan Analisis ABC Terhadap Nilai Persediaan di Instalasi Farmasi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Pharmacon*. 2016;5(3):12–22.
48. Subekti PR. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia; 1979.

49. Wicaksono FS. Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak. Jakarta: Transmedia Pustaka; 2008.
50. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 2018. 35–37 p.
51. Luqman M. Gambaran penerapan pengadaan obat secara E-Purchasing di rumah sakit umum Kota Tangerang. Gambaran penerapan pengadaan obat secara E-Purchasing di rumah sakit umum Kota Tangerang. 2016;1–173.
52. Direktorat Jenderal Binakefarmasian dan Alat Kesehatan. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Direktorat Jenderal Binakefarmasian dan Alat Kesehatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Binakefarmasian dan Alat Kesehatan; 2010. 41 p.
53. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2012.
54. Amiruddin EE, Septarani A WI. Studi tentang Ketersediaan Obat di Puskesmas Meo-Meo Kota Baubau. *J Ilm Kesehat.* 2019;1(2):60–76.
55. Caroline I, Fudholi A, Endarti D. Evaluasi Ketersediaan Obat Sebelum Dan Sesudah Implementasi JKN Pada Puskesmas Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. *Fak Farm Univ Gadjah Mada, Yogyakarta.* 2017;7:30–9.